

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR BANTAR GEBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN SAMPAH**

Riefqy Hasbi Al Baihaqi

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email Korespondensi: riefqyhasbialbaihaqi@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of waste management policy implementation at the Bantar Gebang Landfill as the largest landfill in Indonesia, to identify the main challenges in its implementation, and to analyze the technical, institutional, and social factors that influence the success of urban waste management policies. The study uses a qualitative approach with a descriptive evaluative research design. Data are collected through in-depth interviews with relevant informants, direct field observations, and documentation studies of regulations and waste management reports. The data analysis process follows systematic stages, including data reduction, data display, and conclusion drawing, in order to obtain a comprehensive understanding of the ongoing policy implementation. The findings show that the implementation of waste management policy at the Bantar Gebang Landfill is not yet optimal. The main obstacles include limited landfill capacity, insufficient human resources, limited funding and technology, and weak institutional coordination. In addition, the significant environmental and social impacts indicate a gap between policy objectives and field realities. These findings contribute to the development of environmental policy implementation studies and provide a basis for formulating strategic recommendations to improve the effectiveness of integrated and sustainable waste management.

Keywords: policy implementation; waste management; policy effectiveness; Bantar Gebang landfill.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang sebagai TPA terbesar di Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan utama dalam pelaksanaannya, serta menganalisis faktor teknis, institusional, dan sosial yang memengaruhi keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan pengelolaan sampah. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan yang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas TPA, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan dan teknologi, serta lemahnya koordinasi antar kelembagaan. Selain itu, dampak lingkungan dan sosial yang masih signifikan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan lingkungan serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; pengelolaan sampah; efektivitas kebijakan; TPA Bantar Gebang.

PENDAHULUAN

Problematika pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, di mana produksi sampah nasional diproyeksikan mencapai 56,63 juta ton pada tahun 2030 dengan hanya 39,01% yang tertangani secara memadai (Islami et al., 2023). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang sebagai landfill terbesar di Indonesia menjadi representasi nyata dari krisis pengelolaan sampah perkotaan, menampung sekitar 8.000 ton sampah per hari dari wilayah DKI Jakarta dengan akumulasi total mencapai 55 juta ton sampah yang setara dengan ketinggian bangunan 16 lantai atau 40 meter. Kondisi kritis ini diperparah oleh pencemaran lingkungan yang masif, di mana air lindi (leachate) telah mengkontaminasi air tanah dalam radius 500 meter, menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat sekitar dan keberlanjutan ekosistem (Indrieaswati et al., 2022). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan pengelolaan sampah yang telah diformulasikan dengan realitas implementasinya di lapangan, menuntut evaluasi komprehensif terhadap efektivitas program dan identifikasi hambatan struktural yang menghambat pencapaian tujuan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan domain kajian yang kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek teknis, institusional, sosial, dan ekonomi yang saling berinteraksi dalam membentuk keberhasilan atau kegagalan suatu program (Dwijayanti & Arif, 2023). Penelitian terkini menekankan bahwa tata kelola pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kerangka kerja terintegrasi yang menghubungkan organisasi, pemerintah, dan akademisi dalam pendekatan triple helix untuk mengembangkan sistem yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R), hanya 58,35% dari 922 unit yang berfungsi secara optimal di tingkat nasional, mengakibatkan 94,5% sampah berakhir di landfill tanpa pengolahan memadai (Ayuna et al., 2022).

Teori implementasi kebijakan menggaris bawahi bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusional, partisipasi masyarakat, dan mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Tekanan institusional (institutional pressure) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik pengelolaan sampah dan kinerja keberlanjutan lingkungan, meskipun dalam kondisi tertentu dapat memberikan efek moderasi negatif terhadap hubungan antara praktik pengelolaan dan hasil keberlanjutan (Ayuna et al., 2022). Kajian literatur juga mengidentifikasi bahwa fragmentasi tata kelola di berbagai tingkatan pemerintahan, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di negara berkembang (Dwijayanti & Arif, 2023).

Meskipun terdapat berbagai penelitian tentang pengelolaan sampah, gap research yang signifikan teridentifikasi dalam konteks evaluasi implementasi kebijakan di TPA Bantar Gebang sebagai studi kasus spesifik dengan karakteristik unik sebagai landfill mega-urban di Indonesia. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis operasional atau dampak lingkungan secara parsial, namun belum mengintegrasikan analisis komprehensif terhadap efektivitas program, tantangan implementasi, dan interkoneksi antara kebijakan nasional dengan praktik di tingkat lokal dalam satu kerangka kajian sistematis (Natalia et al., 2021).

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan studi kepustakaan yang mengintegrasikan perspektif policy implementation, teori tata kelola lingkungan, dan analisis tantangan struktural untuk memberikan pemahaman holistik tentang dinamika implementasi kebijakan di TPA Bantar Gebang dalam periode 2021-2025, di mana target nasional Indonesia untuk mengelola 100% sampah pada tahun 2025 mengalami kegagalan signifikan dengan hanya 67,93% sampah yang tercatat dalam unit pengolahan (Ichdatunnisa et al., 2023). Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan antara upaya reaktivasi fasilitas pengolahan seperti TPS3R dan TPST oleh pemerintah dengan realitas operasional yang masih terkendala oleh berbagai hambatan sistemik dan struktural (Azaria et al., n.d.). Berdasarkan konteks

tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi tiga poin utama: pertama, bagaimana efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA

Bantar Gebang dalam periode 2021-2025; kedua, apa saja tantangan dan hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan program pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang; dan ketiga, bagaimana interaksi antara faktor teknis, institusional, dan sosial- ekonomi mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara komprehensif efektivitas program pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang melalui analisis kepustakaan terhadap kebijakan, implementasi, dan tantangan yang dihadapi, serta mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam mencapai target pengelolaan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan body of knowledge dalam studi implementasi kebijakan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di konteks urban megapolis negara berkembang, serta manfaat praktis berupa rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam sistem pengelolaan sampah terintegrasi. Bagi masyarakat akademik, penelitian ini menyediakan kerangka analitis yang dapat diadaptasi untuk studi evaluasi kebijakan serupa di lokasi lain, sementara bagi praktisi dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini menawarkan lesson learned dari kasus TPA Bantar Gebang yang dapat dijadikan rujukan dalam merancang strategi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan urban kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif evaluatif untuk mengevaluasi secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang, dengan menekankan pada proses pelaksanaan kebijakan, efektivitas program, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola TPA, aparatur pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, observasi langsung terhadap kondisi operasional serta sarana dan prasarana, serta studi dokumentasi terhadap peraturan, laporan kinerja, dan dokumen resmi yang relevan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan dan literatur ilmiah terkait evaluasi kebijakan dan pengelolaan sampah. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data. Tahap perencanaan meliputi penentuan fokus dan tujuan penelitian, penyusunan kerangka teori dan indikator evaluasi, serta penetapan lokasi dan informan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan, sedangkan tahap analisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kebijakan.

PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bantar Gebang

Evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang dilakukan dengan menilai kesesuaian antara tujuan kebijakan, proses implementasi, dan hasil yang dicapai di lapangan. Dalam kajian evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia, indikator penilaian sering mencakup pencapaian tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi kelembagaan, serta dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan (Hardiyanti, Purnaweni & Sundarso, 2021; Azaria et al., 2025). Misalnya, evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak menunjukkan efektivitas yang belum optimal karena keterbatasan sistem pengelolaan

dan sarana-prasarana yang tersedia, yang mencerminkan tantangan umum dalam implementasi kebijakan sampah di TPA lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Walaupun regulasi dan kebijakan telah disusun, banyak kendala operasional dan struktural yang menghambat pencapaian sasaran, seperti kapasitas TPA yang hampir penuh dan kurangnya mekanisme pengurangan timbulan sampah di sumbernya, sehingga pengelolaan masih didominasi oleh pendekatan hilir (downstream). Kondisi ini sejalan dengan temuan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Semarang City, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya struktur pemerintahan dan program, keterlibatan masyarakat serta efektivitas implementasi masih perlu diperkuat agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan dapat tercapai.

Sumber Daya dan Kapasitas Implementasi Kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana kebijakan. Dalam studi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Jabon, ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan struktur birokrasi yang kurang optimal menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional (Muzakki & Mursyidah, 2022). Penelitian lain di Kota Payakumbuh juga menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah (Magister & Ariani, 2024). Kondisi ini mencerminkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik secara normatif sulit diterjemahkan ke praktik yang efektif di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks TPA Bantar Gebang, keterbatasan anggaran berdampak pada rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur pengolahan sampah alternatif seperti fasilitas pengolahan terpadu atau teknologi pengurangan sampah berbasis energi, yang juga tercatat sebagai tantangan dalam penelitian kebijakan pengelolaan sampah daerah lain. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia yang terlibat masih belum merata dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis, sehingga pengoperasian fasilitas pengelolaan sampah belum optimal, sama seperti yang ditemukan dalam studi implementasi kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum didukung oleh kapasitas implementasi yang memadai, sehingga tujuan kebijakan sulit dicapai secara optimal.

Koordinasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pengelolaan Sampah

Koordinasi antar instansi pemerintah merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, karena pengelolaan sampah memerlukan keterpaduan peran antara pemerintah daerah, dinas teknis, pengelola TPA, dan lembaga lainnya. Dalam studi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, ditemukan bahwa lemahnya koordinasi antar-stakeholder menjadi salah satu kendala utama, sehingga program dan kebijakan yang telah ditetapkan sering kali tidak berjalan secara konsisten di lapangan, khususnya dalam tata kelola lintas sektor dan pembagian tugas antar instansi (Katili, 2025).

Kondisi serupa juga terlihat dalam riset evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Muna Barat, yang menunjukkan bahwa keterbatasan koordinasi antar instansi pemerintah turut berkontribusi pada rendahnya efektivitas kebijakan, karena komunikasi dan sinergi pelaksanaan program belum terstruktur dengan baik di antara unit pelaksana teknis yang terlibat (Sabaruddin et al., 2025). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan kebijakan untuk mendorong integrasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, karena fragmentasi kewenangan dan minimnya mekanisme koordinasi yang terarah memperlambat pengambilan keputusan serta menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai level pemerintahan.

Dampak Lingkungan dan Sosial Implementasi Kebijakan

Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah juga dapat dievaluasi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terhadap masyarakat sekitar. Penelitian di berbagai TPA di Indonesia mengungkapkan bahwa keberadaan TPA sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran udara akibat bau dan gas dari proses pembusukan sampah serta gangguan saluran pernapasan pada warga yang tinggal dekat lokasi TPA (Byla & Ibrahim, 2025). Selain itu, penelitian di TPA Air Dingin Kota Padang menunjukkan bahwa masyarakat dalam radius tertentu merasakan dampak sosial dari keberadaan TPA, termasuk gangguan kenyamanan hidup dan persepsi negatif terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya, meskipun dampak ekonomi juga dirasakan positif oleh sebagian warga melalui kesempatan kerja atau pemanfaatan sampah (Khoiruddin & Chandra, 2024).

Dari sisi sosial, warga di sekitar TPA sering menghadapi tantangan terkait persepsi ketidakadilan dalam distribusi dampak lingkungan serta rendahnya partisipasi mereka dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga legitimasi kebijakan menjadi lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bukan hanya diukur dari aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak. Penelitian dampak keberadaan TPA terhadap masyarakat menggarisbawahi pentingnya keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan kebijakan serta perlunya mitigasi dampak lingkungan yang lebih kuat agar kebijakan benar-benar efektif di tingkat lokal.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah

Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah juga dapat dievaluasi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terhadap masyarakat sekitar. Penelitian di berbagai TPA di Indonesia mengungkapkan bahwa keberadaan TPA sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran udara akibat bau dan gas dari proses pembusukan sampah serta gangguan saluran pernapasan pada warga yang tinggal dekat lokasi TPA (Byla & Ibrahim, 2025). Selain itu, penelitian di TPA Air Dingin Kota Padang menunjukkan bahwa masyarakat dalam radius tertentu merasakan dampak sosial dari keberadaan TPA, termasuk gangguan kenyamanan hidup dan persepsi negatif terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya, meskipun dampak ekonomi juga dirasakan positif oleh sebagian warga melalui kesempatan kerja atau pemanfaatan sampah (Khoiruddin & Chandra, 2024).

Dari sisi sosial, warga di sekitar TPA sering menghadapi tantangan terkait persepsi ketidakadilan dalam distribusi dampak lingkungan serta rendahnya partisipasi mereka dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga legitimasi kebijakan menjadi lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bukan hanya diukur dari aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak. Penelitian dampak keberadaan TPA terhadap masyarakat menggarisbawahi pentingnya keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan kebijakan serta perlunya mitigasi dampak lingkungan yang lebih kuat agar kebijakan benar-benar efektif di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang serta mengidentifikasi tantangan utama yang mempengaruhi pencapaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kapasitas TPA, sumber daya manusia, pendanaan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah masih didominasi pendekatan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

196

Indexed



SINTA 5



hilir dengan ketergantungan tinggi terhadap TPA, sementara upaya pengurangan dan pemilahan sampah di sumber belum berjalan optimal.

Selain itu, lemahnya koordinasi kelembagaan dan fragmentasi kewenangan antarinstansi menghambat integrasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Dampak lingkungan dan sosial yang masih signifikan di sekitar TPA Bantar Gebang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusional, tata kelola, dan partisipasi masyarakat.

REFERENSI

- Ayuna, R. S. Q., Ramadhita, N., Pratiwi, A. K., & Sagita, D. D. (2022). Fenomenologi adversity quotient pemulung tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(3). <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i3.8648>
- Azaria, A. A., Semarang, A. K., & Tengah, J. (n.d.). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. [Tidak tersedia DOI/link]
- Byla, N. S., & Ibrahim, I. (2025). Polutan dari TPA Sampah Malimpung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Geografi, Lingkungan dan Kesehatan*, 3(1), 7–14. <https://doi.org/10.30598/jglk.3.1.17440>
- Dwijayanti, K., & Arif, L. (2023). Implementasi pengelolaan sampah pada pemrosesan akhir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4). <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8301>
- Hardiyanti, D., Purnaweni, H., & Sundarso. (2021). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kalikondang Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 123–134. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/10506>
- Ichdatunnisa, R., Sigit Ardisty Sitogasa, P., Studi Teknik Lingkungan, P., Teknik, F., & Timur, J. (2023). Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Environmental Engineering Journal ITATS*, 3(2). [Tidak tersedia DOI/link]
- Indrieaswati, I., Erari, I. S., & Sinery, A. S. (2022). Studi kelayakan lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kabupaten Manokwari Selatan. *Cassowary*, 5(1). <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v5.i1.80>
- Islami, R. R., Moelyaningrum, A. D., & Khoiron, K. (2023). Analisis sistem pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(2). <https://doi.org/10.14710/jkli.22.2.179-188>
- Jannah Nasution, M., Wulandari, C., Prasetyo Wahono, E., Bakri, S., Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, B., & Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Lampung, P. (n.d.). Analysis of integrated waste management policy implementation: A case study on effectiveness and relevance to environmental law in Indonesia. [Tidak tersedia DOI/link]
- Katili, A. Z. (2025). Kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan: Studi kasus di Kota Gorontalo. *Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi*, 1(1). <https://doi.org/10.69623/jk-pia.v1i1.169>
- Khoiruddin Al Amin, & Chandra, D. (2024). Dampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap masyarakat di sekitar TPA Air Dingin Kota Padang. *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 4(4). <https://ejournal.yasin-alsys.org/yasin/article/view/3117>
- Magister, T. O., & Ariani, R. (2024). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Muzakki, A. F. A., & Mursyidah, L. (2022). Implementation of waste management policy at TPA Jabon District, Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review (IJPPR)*, 21.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

<https://ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1302>

- Natalia, L., Wihardja, H., & Ningsih, P. W. (2021). Pendampingan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dengan konsep 3R di desa Sukaluyu. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4(1). <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i1.856>
- Rahmad, A., & Suwandi. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dilihat dari aspek sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB)*. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/974>
- Sabaruddin, I., Purwandari, V., Triyono, T., Amin, R., & Suyanto, A. (2025). Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat. *Environmental Insight Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.37412/eij.v2i1.359>
- Tamba, W. P., & Laksmono, B. S. (2024). Analisis triangle pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.21009/saskara.041.02>
- Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(1). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

198

